



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN I TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR



Kegiatan pemantauan dan penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) dalam laporan ini juga diharapkan dapat menjadi pengalaman yang berguna untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan selanjutnya.

Realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2017 mencapai 12,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 yang mencapai 13,7 persen. Tetapi realisasi penyerapan tersebut masih lebih baik dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan pertama, yaitu sebesar 11,5 persen. Menurunnya kinerja penyerapan tersebut, antara lain disebabkan adanya penurunan persentase penyerapan yang cukup signifikan pada beberapa instansi, antara lain pada Kemenhan, Kepolisian RI, dan BPKP. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan I Tahun 2017, terdapat 31 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penarikan pinjaman. Beberapa kendala yang masih menjadi penyebab rendahnya kinerja proyek, antara lain permasalahan pembebasan lahan, pengadaan barang/jasa, dan kinerja kontraktor yang buruk.

Pembelajaran (*lesson learned*) pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang dicantumkan dalam laporan ini, antara lain dari proyek *The Development and Quality Improvement of The Semarang State University* pada Kemenristekdikti yang memberikan pembelajaran tentang pentingnya harmonisasi prosedur pengadaan nasional dengan prosedur pengadaan sesuai standar *lender*. Pada proyek *Padang By Pass Capacity Expansion Project* di Kemen PUPR, didapatkan pembelajaran mengenai pentingnya koordinasi antara pelaksana proyek (balai dan kontraktor) dengan *lender* agar penyelesaian masalah proyek dapat dilakukan lebih cepat, serta pentingnya komitmen yang kuat dari pemda untuk menjamin terlaksananya proyek dengan baik. Selain itu, pada proyek *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant* yang dikelola PT. PLN dapat diperoleh pembelajaran tentang perlunya pengaturan atau kebijakan khusus terkait penggunaan tenaga kerja asing.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang didapatkan dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DAFTAR ISTILAH

ADB	: Asian Development Bank
AFD	: Agence Francaise de Development
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	: Badan Pengusahaan Batam
BPS	: Badan Pusat Statistik
EU	: European Union
IDB	: Islamic Development Bank
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
JICA	: Japan International Cooperation Agency
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemen KP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemennaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemennakominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenuh	: Kementerian Perhubungan
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemen PPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
KSA	: Kreditor Swasta Asing
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	: Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i> ; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah
PT. PII	: PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. Pertamina	: PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT.PLN	: PT. Perusahaan Listrik Negara
PT. SMI	: PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2016 (posisi 31 Maret 2017) sebesar ekuivalen USD 16.414,3 juta, terdiri dari 156 proyek yang dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami kenaikan sebesar USD 1.096,1 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang baru efektif, sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 adalah sebesar USD 7.284,5 juta atau mencapai 44,4 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Apabila dilihat dari kinerja penyerapan, realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 adalah sebesar USD 320,2 juta atau mencapai 12,3 persen dari target Tahun Anggaran 2017 sebesar USD 2.599,7 juta. Persentase penyerapan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penyerapan pada triwulan pertama dalam lima tahun terakhir, yaitu 11,5 persen. Kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya sekitar 31 proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 17,5 persen dari target penyerapan di tahun 2017. Namun demikian, masih terdapat cukup banyak proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (*penyerapan nol*).

Rendahnya kinerja beberapa proyek disebabkan oleh sejumlah permasalahan, diantaranya rendahnya kinerja kontraktor, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Dalam laporan ini juga disampaikan pembelajaran (*lesson learned*) dari proyek yang masih berjalan dan proyek yang sudah selesai, serta uraian kinerja pelaksanaan dari beberapa proyek hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan.

PINJAMAN LUAR NEGERI

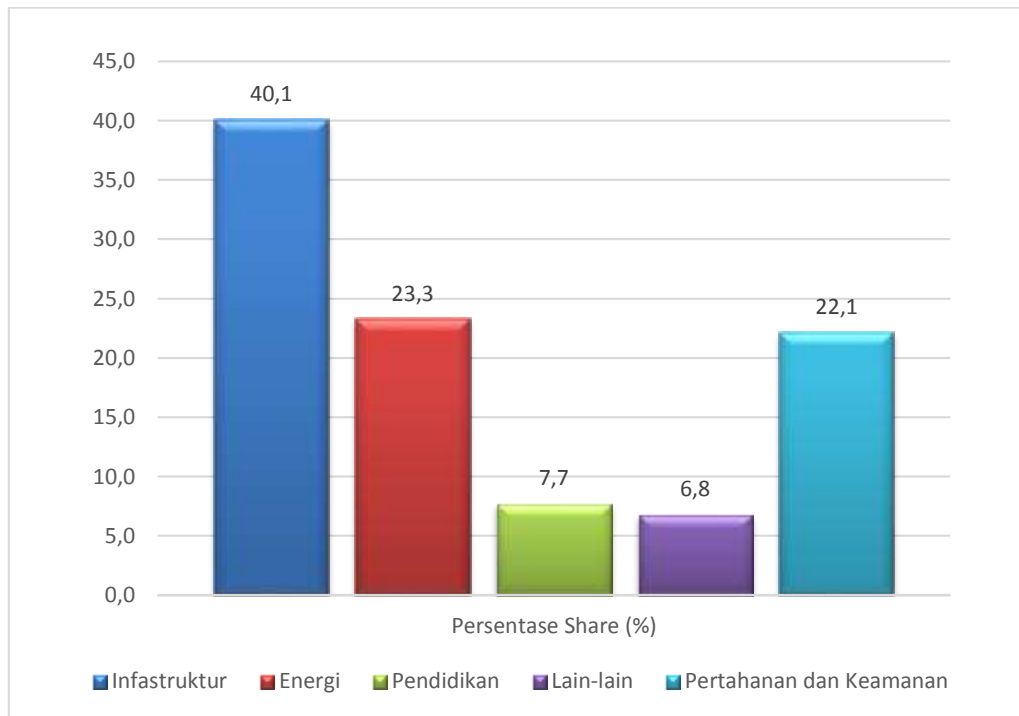
1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2017

Pinjaman luar negeri dapat dilihat profilnya berdasarkan pengelompokan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2017, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2016.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Bila dikelompokkan dalam sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi ke dalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 63,4 persen. Besarnya alokasi tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang mengutamakan pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, yang meliputi pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2016), terdapat penurunan komposisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, yaitu dari 30,0 persen menjadi 22,1 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor lain-lain, yaitu dari 7,5 persen turun menjadi 6,8 persen. Selain itu, dalam periode yang sama, komposisi pinjaman di sektor energi mengalami sedikit peningkatan dari 21,9 persen menjadi 23,3 persen. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor pendidikan yang mengalami sedikit kenaikan dari 7,5 persen menjadi 7,7 persen. Namun peningkatan komposisi pinjaman yang cukup signifikan terjadi di sektor infrastruktur yang mengalami kenaikan dari 33,3 persen menjadi 40,1 persen. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (*closed*).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(Ekuivalen Juta USD)

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Infrastruktur	46	6.580,5	2.601,1	39,5	3.979,4	888,0	65,3	7,4
Energi	19	3.823,0	877,2	22,9	2.945,8	384,0	87,5	22,8
Pendidikan	14	1.267,0	472,4	37,3	794,6	170,8	23,0	13,5
Lain-lain	14	1.112,9	684,1	61,5	428,9	167,2	3,4	2,0
Pertahanan dan Keamanan	63	3.630,8	2.649,7	73,0	981,1	989,6	140,9	14,2
Total	156	16.414,3	7.284,5	44,4	9.129,7	2.599,7	320,2	12,3

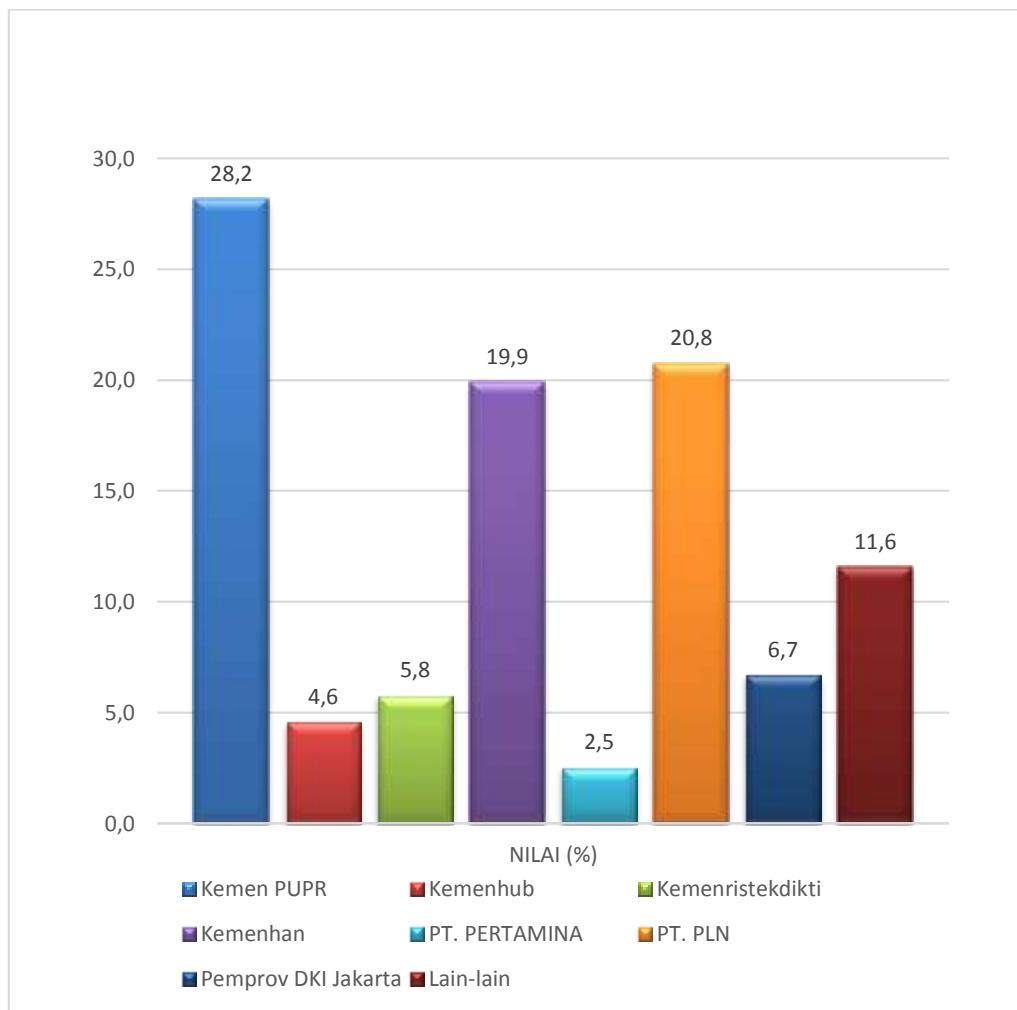
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Realisasi penyerapan pada triwulan ini secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016, yaitu turun dari 13,7 persen menjadi 12,3 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, sektor energi memiliki kinerja penyerapan yang cukup tinggi, yaitu mampu menyerap 22,8 persen dari target penyerapan di tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 4,8 persen. Disamping itu, kinerja di sektor pendidikan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 12,7 persen pada Triwulan I Tahun 2016, menjadi 13,5 persen pada triwulan ini. Sebaliknya, kinerja penyerapan di sektor Pertahanan dan Keamanan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 34,3 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi hanya 14,2 persen pada triwulan ini. Demikian pula sektor lain-lain, mengalami penurunan kinerja penyerapan dari 4,8 persen pada Triwulan I Tahun 2016 menjadi hanya 2,0 persen pada triwulan ini. Sedangkan kinerja penyerapan sektor infrastruktur tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 7,3 persen, karena capaian pada triwulan ini juga hanya sekitar 7,4 persen.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada gambar 2.2. Komposisi terbesar masih berada di Kemen PUPR, Kemenhan dan PT. PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kemen PUPR dari 26,8 persen pada triwulan lalu menjadi 28,2 persen pada triwulan ini. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi pada Kemenhub, yaitu dari 3,6 persen pada triwulan lalu menjadi 4,6 persen pada triwulan ini. Pemprov DKI Jakarta juga mengalami peningkatan, yaitu dari 2,5 persen pada triwulan lalu menjadi 6,7 persen pada triwulan ini, dan pada PT. PLN, yaitu dari 20,0 persen pada triwulan lalu menjadi 20,8 persen pada triwulan ini. Sedangkan komposisi pinjaman pada Kemenhan mengalami penurunan dari 26,4 persen menjadi 19,9 persen pada periode yang sama. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi pada PT. Pertamina, yaitu dari 3,2 persen pada triwulan lalu menjadi 2,5 persen pada triwulan ini. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi pada Kemenristekdikti dan kelompok instansi lain-lain.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2, maka apabila dilihat dari nilai pinjaman, terdapat peningkatan nilai pinjaman yang cukup besar dari Triwulan I Tahun 2016 ke Triwulan I Tahun 2017, yaitu naik sebesar USD 1.096,1 juta. Perubahan nilai pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada Kemen PUPR yang naik sebesar USD 680,3 juta, disusul kemudian oleh PT. PLN yang naik sebesar USD 596,3 juta, dan Pemprov DKI Jakarta yang naik sebesar USD 672,1 juta. Peningkatan nilai pinjaman juga terjadi pada Kemenhub sebesar USD 133,5 juta, dan Kemenristekdikti sebesar USD 117,3 juta. Sedangkan Kemenhan mengalami penurunan sebesar USD 1.025,2 juta. Penurunan nilai pinjaman juga terjadi pada PT. Pertamina sebesar USD 124,5 juta, dan Kemen KP sebesar USD 10,0 juta. Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*), dan adanya proyek-proyek yang baru efektif.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/ Lembaga	133	11.386,0	5.906,4	51,9	5.479,5	1.872,1	216,7	11,6
BIG	1	56,9	55,8	98,1	1,1	0,0	0,0	0,0
BPKP	1	57,8	38,9	67,3	18,9	44,8	0,0	0,0
BP Batam	1	47,7	2,5	5,2	45,2	21,5	0,0	0,0
BPS	1	47,0	3,7	7,9	43,3	13,4	0,0	0,0
Kemenag	1	123,8	0,6	0,5	123,1	14,8	0,5	3,5
Kemendes PDTT	2	518,1	345,5	66,7	172,7	6,4	0,1	1,1
Kemen KP	3	156,9	87,9	56,0	69,0	16,5	0,0	0,0
Kemennaker	1	32,5	3,2	9,8	29,3	24,1	0,0	0,0
Kemenkominfo	1	51,3	49,4	96,3	1,9	3,9	2,3	60,1
Kemen PUPR	37	4.621,8	1.970,0	42,6	2.651,8	486,4	49,3	10,1
Kemendikbud	1	20,3	20,0	98,4	0,3	1,4	0,0	0,0
Kemenuh	5	753,5	130,2	17,3	623,2	58,0	0,1	0,1
Kementan	2	129,1	85,3	66,1	43,8	32,5	1,0	3,0
Kemen PPN/Bappenas	2	175,8	116,1	66,1	59,7	21,9	5,3	24,4
Kemenristekdikti	10	947,2	335,8	35,4	611,4	132,9	17,2	12,9
Kepolisian RI	22	363,7	165,6	45,5	198,1	221,3	2,5	1,1
Kemenhan	41	3.267,1	2.484,1	76,0	783,0	768,3	138,4	18,0
LIPI	1	15,7	12,0	76,1	3,7	4,1	0,0	0,0
Diteruspinjamkan (SLA)	21	3.927,6	979,9	24,9	2.947,8	384,9	87,5	22,7
PT. PII	1	4,6	2,7	59,3	1,9	0,9	0,0	0,0
PT. PERTAMINA	2	415,6	159,6	38,4	255,9	85,5	2,3	2,7
PT. PLN	17	3.407,4	717,6	21,1	2.689,9	298,4	85,2	28,6
PT. SMI	1	100,0	99,9	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Diterushibahkan	2	1.100,7	398,3	36,2	702,4	342,7	15,9	4,7
Pemprov DKI Jakarta	2	1.100,7	398,3	36,2	702,4	342,7	15,9	4,7
Total	156	16.414,3	7.284,5	44,4	9.129,7	2.599,7	320,2	12,3

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement* atau SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan I Tahun 2016), beberapa instansi penanggung jawab proyek mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan pada triwulan ini, yaitu Kemenkominfo, PT. PLN, dan Kemen PPN/Bappenas. Beberapa instansi tersebut dikategorikan menjadi instansi yang memiliki kinerja penyerapan yang sangat baik karena telah melakukan penyerapan di atas 17,5 persen pada Triwulan I Tahun 2017. Selain terjadi peningkatan kinerja penyerapan pada beberapa instansi, pada triwulan ini juga masih terdapat cukup banyak instansi penanggungjawab yang belum melakukan penyerapan, sehingga tingkat penyerapannya masih sama atau bahkan belum melakukan penyerapan, (nol). Terdapat sekitar 8 (delapan) instansi yang pada Triwulan I Tahun 2017 belum melakukan penyerapan. Khusus untuk BIG dengan proyek *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development*, dan PT. SMI dengan proyek *Indonesia Infrastructure Finance Facility*, tidak adanya penyerapan yang dilakukan di triwulan ini karena proyek sebenarnya sudah selesai dan menunggu *closing date*.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

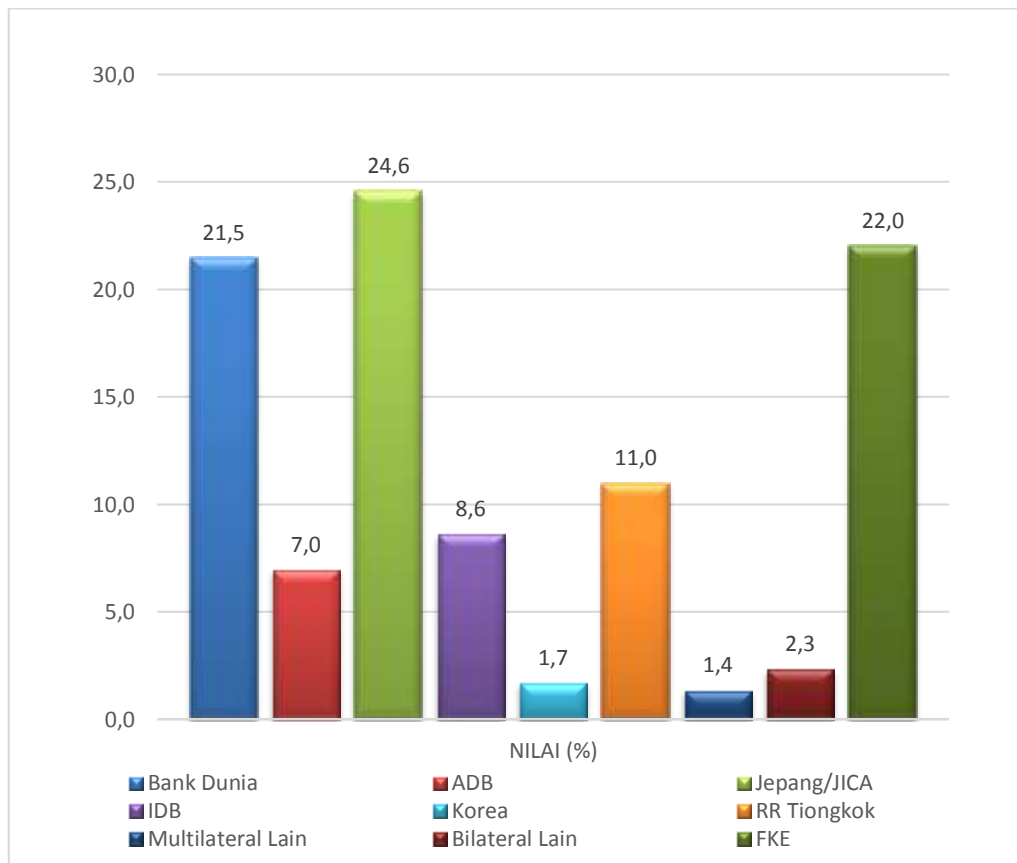
Sumber pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), Kreditor Bilateral, dan Kreditor Multilateral.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Australia, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, dan *Saudi Fund*.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund
 - Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Jerman, Perancis, dan Spanyol

Sekitar hampir 68 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2016), terdapat perubahan yaitu menurunnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 22,1 persen pada Triwulan I Tahun 2016 menjadi 21,5 persen pada Triwulan I Tahun 2017. Penurunan komposisi juga terjadi pada porsi pinjaman Jepang yang turun dari 26,1 persen menjadi 24,6 persen, dan porsi pinjaman LPKE yang turun dari 29,9 persen menjadi 22,0 persen. Sebaliknya, pada rentang periode yang sama, terjadi kenaikan porsi pinjaman IDB dari 6,2 persen menjadi 8,6 persen, dan pinjaman RR Tiongkok dari 3,5 persen menjadi 11,0 persen. Untuk komposisi pada pemberi pinjaman lain tidak mengalami banyak perubahan.

Dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2016, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 16.414,3 juta mengalami penurunan sebesar USD 415,6 juta dari triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang selesai (*closed*), sehingga beberapa pemberi pinjaman mengalami penurunan nilai pinjaman. KSA/LPKE mengalami penurunan nilai pinjaman yang paling signifikan, yaitu sebesar USD 1.245,0 juta, disusul kemudian oleh Bank Dunia sebesar USD 150,0 juta, IDB sebesar USD 49,3 juta, dan Jerman sebesar USD 32,9 juta.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Loan	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
						Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	57	6.301,6	2.289,8	4.011,8	662,2	67,2	10,1
	Bank Dunia	19	3.522,2	1.543,5	1.978,7	225,7	24,4	10,8
	ADB	13	1.143,1	259,3	883,8	174,0	7,2	4,1
	IDB	20	1.414,1	340,9	1.073,2	224,3	35,4	15,8
	IFAD	3	151,2	123,4	27,8	24,7	0,2	0,8
	Saudi Fund	2	71,0	22,7	48,3	13,5	0,0	0,0
II	Kreditor Bilateral	53	6.498,6	2.351,5	4.147,1	954,8	110,3	11,6
	Jepang	29	4.032,6	1.652,5	2.380,1	578,6	41,5	7,2
	Jerman	2	100,4	22,2	78,2	13,3	0,0	0,0
	Korea	5	278,6	68,1	210,5	74,3	3,6	4,8
	Perancis+AFD	5	267,9	116,6	151,3	16,3	2,3	14,4
	RR Tiongkok	11	1.803,4	480,1	1.323,2	268,2	62,9	23,5
	Spanyol	1	15,7	12,0	3,7	4,1	0,0	0,0
III	KSA/LPKE	64	3.614,1	2.643,3	970,9	982,7	142,7	14,5
TOTAL		174	16.414,3	7.284,5	9.129,7	2.599,7	320,2	12,3

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2017 yang mencapai 12,3 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 14,5 persen, Kreditor Bilateral sebesar 11,6 persen dan Kreditor Multilateral sebesar 10,1 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek pinjaman IDB dan Bank Dunia, yang masing-masing mencapai 15,8 persen dan 10,8 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek pinjaman RR Tiongkok dan Perancis, yaitu mencapai 23,5 persen dan 14,4 persen.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN I TAHUN 2017

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk kedalam pemantauan triwulanan. Sedangkan pada tabel 2.5 dapat dilihat beberapa proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan I Tahun 2017.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan I Tahun 2017

(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif				
1	<i>Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)</i>	Kemen PUPR	ADB	148,2
2	<i>Flood Management in Selected River Basin</i>	Kemen PUPR	ADB	108,7
3	<i>Toll Road Development of Solo Kertosono I</i>	Kemen PUPR	RR Tiongkok	198,8
4	<i>Toll Road Development of Balikpapan Samarinda</i>	Kemen PUPR	RR Tiongkok	53,4
5	<i>Toll Road Development of CISUMDAWU Phase II</i>	Kemen PUPR	RR Tiongkok	219,4
6	<i>Toll Road Development of Manado-Bitung</i>	Kemen PUPR	RR Tiongkok	78,1
7	<i>Procurement of Track Material and Turnout Phase I</i>	Kemenhub	RR Tiongkok	175,1
8	<i>Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II</i>	Pemprop DKI Jakarta	JICA	671,1
TOTAL				1.652,8

Tabel 2.5 Rekapitulasi Proyek Tutup di Triwulan I Tahun 2017

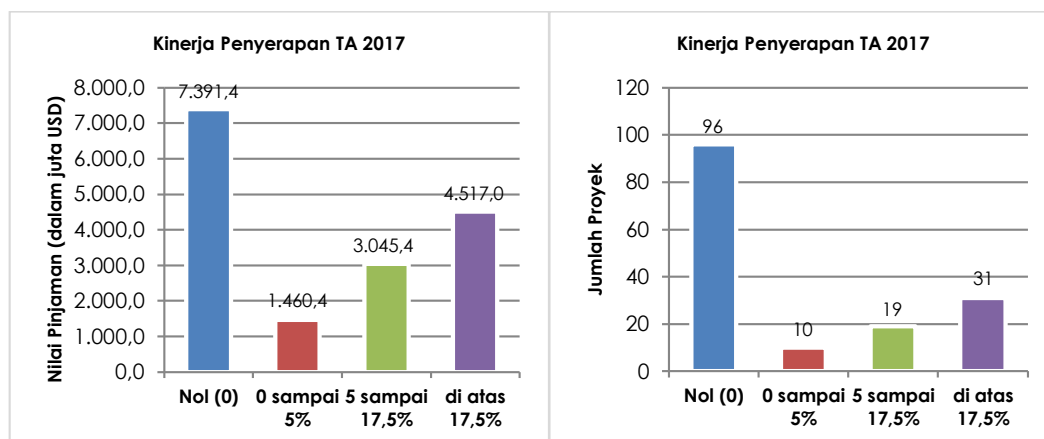
(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Berakhir Masa Berlakunya				
1	<i>Tanjung Priok Access Road Construction Project II</i>	Kemen PUPR	JICA	228,6
2	<i>The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project</i>	Kemenristekdikti	IDB	36,0
3	<i>Track Maintenance Improvement Programme</i>	Kemenhub	Jerman	34,3
TOTAL				298,9

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2017

Realisasi penyerapan sampai dengan triwulan ini mencapai 12,3 persen dari target penyerapan anggaran tahun 2017. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami penurunan sebesar 1,4 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan yang signifikan untuk realisasi penyerapan pada proyek-proyek LPKE/KSA, sedangkan realisasi penyerapan untuk proyek-proyek *soft loan* dari Kreditor Bilateral maupun Kreditor Multilateral cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, bahkan mencapai diatas 17,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat pula beberapa proyek yang belum melakukan penyerapan atau bahkan tidak mengalami pergerakan sejak mulai efektif sampai dengan Triwulan I Tahun 2017.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan TA 2017 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2017 (diolah)

Secara umum terdapat sekitar 31 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penyerapan tahun 2017. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 31 proyek tersebut bernilai USD 4.517,0 juta atau 27,5 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 16.414,3 juta. Sekitar 106 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 5,0 persen terhadap target tahun 2017. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan sejak proyek dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap proyek-proyek tersebut karena nilainya mencapai USD 8.851,8 juta atau 53,9 persen dari total nilai pinjaman. Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses revidu terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya revidu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application (WA)* dan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi. Permasalahan lainnya yang saat ini mulai sering dilaporkan adalah rendahnya kinerja kontraktor yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, disamping masalah terkait lainnya seperti kekurangan tenaga kerja, material dan peralatan berat.

3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN PROYEK

Dalam Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 ini, dipaparkan 2 (dua) contoh proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Proyek tersebut adalah 2 (dua) proyek yang masih berjalan (*on going project*), yaitu *Padang By Pass Capacity Expansion Project* yang dikelola Kemen PUPR, dan *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project* yang dikelola PT. PLN.

Padang By Pass Capacity Expansion Project

Proyek *Padang By Pass Capacity Expansion* dibiayai melalui pinjaman Korea (EDCF) dengan *Loan* No. INA – 17. *Loan* efektif sejak 14 April 2014 dan akan berakhir pada 14 Agustus 2017. Biaya proyek ini mencapai USD 55,7 juta. Ruang lingkup proyek ini adalah peningkatan kapasitas jalan mejadi empat lajur dua arah sepanjang 26,5 km, dan pembangunan sembilan buah jembatan.

Tabel 2.6, Data Umum Proyek Padang By Pass Capacity Expansion (EDCF Loan No. INA – 17)

Nama Proyek	<i>Padang By Pass Capacity Expansion Project</i> (EDCF Loan INA – 17)
Nomor Kontrak	KU.08.08/KTR.06.PPK-12-PJN.II/IV/2014
Deskripsi Proyek	Peningkatan kapasitas menjadi empat lajur dua arah jalan
Tujuan Proyek	Jalan Padang By Pass berfungsi secara optimal dalam mendukung angkutan barang dan orang
Ruang Lingkup Proyek	Jalan sepanjang 26,5 km dan sembilan buah jembatan
Instansi Pelaksana	PPK 2.1 Padang-Solok-Sawahlunto, Satker PJN Wilayah II Propinsi Sumatera Barat, BPJN III Padang, Dirjen Bina Marga, Kemen PUPR
Konsultan	<i>DOHWA Engineering Co., Ltd In Association with PT. Perentjana Djaja and PT. Hasfarm Dian Konsultan</i>
Kontraktor	<i>Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd In Association with PT. Yala Persada Ankasa</i>
Sumber Pembiayaan	<i>Economic Development Cooperation Fund</i> (EDCF Loan No. INA – 17)
Nilai Pinjaman Proyek	IDR 436.006.233.313 (Perubahan No. 8 (Excluding VAT 10%))
Ruang Lingkup Pekerjaan	a) Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 26,5 km (kota Padang 25 km dan Pariaman 1,4 km), termasuk jembatan, pipa, dan konstruksi jembatan layang dan <i>underpass level crossings</i>) b) Pekerjaan konsultan (pembuatan DED, persiapan dokumen <i>bidding</i> , supervisi konstruksi jalan, dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek)
Lokasi	Ruas jalan <i>Padang By Pass</i> dan <i>By Pass I</i> , Kota Padang, Sumatera Barat (Gaung – Lubuk Begalung – Duku)
Masa Berlaku	29 April 2014 sampai dengan 29 Mei 2017
Tanggal Mulai	8 Agustus 2014

Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan proyek ini, dan sampai saat ini masih menjadi kendala, antara lain:

1) Keuangan:

- Pembayaran paket pekerjaan konsultan belum bisa dilakukan sejak Juli 2016 karena belum adanya persetujuan dari EDCF mengenai addendum kontrak konsultan (Add No. 3,4, dan 5).
- Pembayaran pekerjaan fisik oleh kontraktor juga mengalami keterlambatan selama empat bulan (Oktober 2016 – Januari 2017) karena keterlambatan persetujuan pemakaian *Foreign Currency Portion*.

2) Kondisi teknis di lapangan:

- Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran.
- Terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan, padahal sesuai dengan *timeline* kegiatan, seluruh median seharusnya sudah mencapai 100 persen (dalam hal ini, kontraktor wajib untuk menyelesaikan sebelum tanggal 29 Mei 2017).
- Terdapat pekerjaan aspal yang belum dikerjakan sebanyak 9.000 ton, dengan rincian:
 - Pekerjaan bahu jalan baru selesai 50 persen, sisa pekerjaan juga belum dibersihkan dan belum dirapikan.
 - Masih tersisa tiga buah jembatan *existing* (jembatan lama) yang belum diperbaiki/*overlaid*, belum diaspal, belum dicat, dan pada bagian *handrail* belum dipasang.

- Utilitas marka jalan belum selesai dilaksanakan:
 - Rambu-rambu lalu lintas yang terdiri dari marka jalan, lampu merah, dan lain sebagainya belum seluruhnya dipasang di tempat-tempat yang krusial, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan dan tidak tertibnya lalu lintas.
 - Lampu penerangan jalan dengan total 700 unit baru terpasang sekitar 200 unit saja, akibatnya kondisi jalan di malam hari cukup gelap.

3) Pembebasan lahan.

Terdapat beberapa bagian lahan sekitar 2 km yang tidak bisa dilakukan konstruksi karena dihalangi oleh pemilik lahan, dengan alasan konsolidasi lahan belum selesai. Padahal penyelesaian 2 km lahan tersebut sangat penting karena menyangkut fungsional jalan dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Selain itu, terdapat juga isu terkait sertifikasi hak guna bangunan yang masih dalam proses, dan ditemukannya satu tambahan spot baru yang bermasalah di STA 4.250 sepanjang 26 m, yang semula dijanjikan oleh Pemerintah Daerah setempat akan dibebaskan. Saat ini, pelaksana proyek masih memroses laporan akhir pengadaan tanah bersama Pemerintah Daerah setempat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Secara keseluruhan persentase kemajuan sampai dengan berakhirnya proyek adalah: 1) penyerapan terhadap *loan* tetap berada pada persentase 51 persen; 2) pekerjaan fisik (Paket *Civil Works*) mencapai 78,7 persen, dan pekerjaan konsultan (Paket *Consultong Services*) mencapai 74,4 persen.

Sehubungan kontrak akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2017, dan masalah penyelesaian pembebasan lahan belum ada kepastian, maka diputuskan kontrak tidak akan diperpanjang, dan kontraktor harus melakukan optimalisasi pekerjaan sebagai kewajiban di akhir masa kontrak.

Pembelajaran yang dapat diperoleh dari *Padang By Pass Capacity Expansion Project* adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi proyek, perlunya koordinasi yang sangat baik antara pelaksana proyek di lapangan, terutama antara balai dan kontraktor untuk mempercepat proses penyelesaian masalah, dan mempercepat penyelesaian proyek. Koordinasi yang baik juga perlu dilakukan antara pelaksana proyek dengan *lender* (EDCF) terutama dalam penyelesaian pembayaran kontraktor dan konsultan, sehingga tuntutan pembayaran jasa yang belum selesai pasca proyek dapat dihindari.
2. Komitmen, perlunya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk menjamin terlaksananya proyek dengan baik, terutama dalam pembebasan lahan melalui mekanisme konsolidasi. Pemerintah Daerah harus bisa memastikan bahwa proses konsolidasi memang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan warga terdampak benar-benar memperoleh apa yang menjadi haknya. Sehingga penolakan warga dan penghadangan terhadap pekerja proyek dapat dihindari.

**Gambar 2.5. Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Lapangan
*Padang By Pass Capacity Expansion Project***



Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project

Proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant merupakan proyek pinjaman luar negeri yang dibiayai oleh RR Tiongkok. Proyek ini merupakan salah satu proyek PT. PLN yang menggunakan metode *Engineering Leading Concept*, sehingga peran kontraktor dan konsultan teknis lebih dominan. Metode ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proyek, karena konsultan teknis terlibat secara langsung dalam semua proses, termasuk dalam proses tender. Konsultan supervisi konstruksi dan QA/QC salah satunya menggunakan *Black and Veatch*, sebuah perusahaan konsultan teknis, pengadaan, dan konstruksi dari Amerika Serikat dengan spesialisasi di bidang energi, sumber daya air, dan telekomunikasi.

**Tabel 2.7. Data Umum Proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant
(Loan China – EXIM LA.12.11.2012)**

Nama Proyek	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project (Loan China – EXIM LA. 12.11.2012)
Ruang Lingkup Proyek	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 x 50 MW
Instansi Pelaksana	PT. PLN (Persero) – UIP Kalimantan Bagian Barat
Konsultan Design Review	PT. PLN Enjiniring (PLNE)
Konsultan Supervisi Konstruksi dan QA/QC	PT. PLN Enjiniring (PLNE) dan <i>Black & Veatch</i>
Kontraktor	Konsorsium China Gezhouba Group Co.Ltd – PT. Praba Indopersada
Nilai Kontrak	USD 92.449.153,50 dan IDR 681.319.732.357,00 <i>Additional Cost</i> IDR 1.962.321.900,00
Ruang Lingkup Pekerjaan	a) <i>Engineering</i> b) <i>Procurement</i> c) <i>Construction (civil works, mechanical works, electrical works)</i>
Lokasi	Jl. Raya Singkawang Pontianak km. 127, Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Kalimantan Barat
Masa Berlaku	26 Maret 2013 sampai dengan 28 April 2017

Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan proyek ini, antara lain:

- 1) Pembebasan lahan.
Serifikat Hak Guna Bangunan masih dalam proses. Namun, Laporan akhir pengadaan tanah sudah diterbitkan oleh Tim P2T Kabupaten Bengkayang dan sudah diproses oleh UIP Kalimantan Bagian Barat ke BPN Kanwil Kalimantan Barat.
- 2) Teknis.
Terdapat desain gambar atau *design drawing* yang belum selesai. Pihak konsultan (PLNE) sudah menyampaikan bahwa daftar *outstanding drawing* masih belum lengkap, sehingga kontraktor diminta untuk melakukan reviu secara keseluruhan dan memperbarui daftar *outstanding drawing*.
- 3) Perijinan.
 - Ijin penetapan lokasi *jetty* (terminal khusus) belum diterbitkan oleh Kemenhub.
 - Ijin *dredging* masih disusun oleh kontraktor.
- 4) Peralatan/kualitas.
Penyelesaian beberapa area proyek masih terkendala karena rusaknya beberapa peralatan berat, seperti *service crane*, *excavator*, *mix truck*, dan *bulldozer*. Selain itu juga dilaporkan adanya kekurangan *manpower* dan material. Jumlah tenaga kerja yang tersedia saat ini adalah 877 orang dari rencana 905 orang. Tenaga ahli dari luar negeri yang bukan *engineer* tetapi

memiliki keterampilan dalam instalasi dan pengoperasian peralatan mengalami kesulitan dalam pengurusan ijin kerja.

5) Perpanjangan masa laku pinjaman.

PT. PLN berencana untuk melakukan perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan Juni 2019 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan *Commercial on Operation Date* (COD) akan dilakukan pada akhir tahun 2017, ditambah masa pemeliharaan selama satu tahun sampai akhir tahun 2018, dan masa penyelesaian administratif selama enam bulan. Untuk keperluan perpanjangan tersebut, PT. PLN sudah menyampaikan *explanatory note* kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant* adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan khusus terkait penggunaan tenaga kerja asing, mengingat adanya beberapa perjanjian kerjasama pembangunan yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja dari negara pemberi bantuan, maka pemerintah melalui instansi terkait perlu mengkoordinasikan adanya kebijakan khusus untuk mengakomodasi kondisi tersebut. Alternatif lainnya adalah dengan menegosiasikan persyaratan tersebut menjadi lebih minimal, dan dapat digantikan oleh tenaga kerja lokal. Meskipun tetap diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memerlukan waktu.
2. Koordinasi antar pihak terkait masalah pembebasan lahan dan perijinan, pelaksana proyek perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan para pihak yang terkait pembebasan lahan dan perijinan agar pelaksanaan proyek dapat dipercepat, terutama dalam hal pembangunan sarana penting bagi operasional proyek seperti perijinan untuk pembangunan terminal khusus (*jetty*).

Gambar 2.6. Dokumentasi Kunjungan ke Lokasi Proyek *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant*



HIBAH LUAR NEGERI

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Meskipun pengelolaan hibah tidak serumit pinjaman tetapi akuntabilitasnya harus tetap dijaga, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan hibah juga dilakukan secara berkala.

Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil pemantauan selain digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan, juga digunakan sebagai pembelajaran dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2017 berjumlah 10 (sepuluh) proyek, yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, dan Mahkamah Agung.

Hibah *Community-Focused Investment to Address Deforestation and Degradation Project (Forest Investment Program/FIP 1)*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hibah investasi khusus bagi masyarakat untuk penanggulangan deforestasi dan degradasi hutan ini baru difundir pada tanggal 26 Oktober 2016 senilai USD 17,5 juta untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun dari 2017-2021. Hibah ini bertujuan untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek.

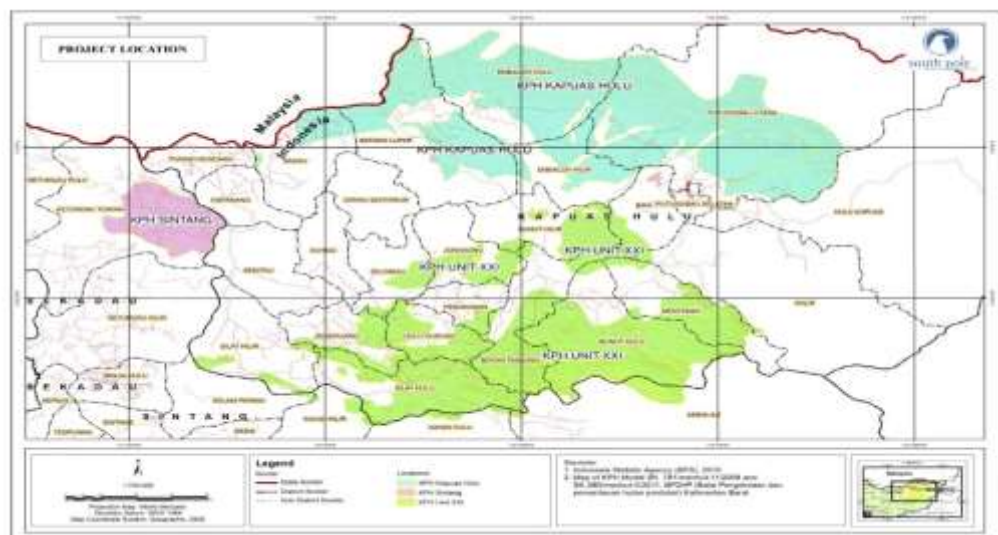
Executing agency dari kegiatan hibah ini adalah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun *implementing agency* terdiri dari 3 (tiga) direktorat, yaitu Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

Ruang lingkup kegiatan hibah meliputi: 1) Terlaksananya *community-focused and responsive REDD+ Pilots* di 17 desa di 4 (empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu; 2) Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Propinsi Kalimantan Barat; 3) Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

Hibah *Forest Investment Program/FIP 1* ini dilaksanakan di 3 (tiga) KPH di Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi 13 desa, dan 1 (satu) KPH di Kabupaten Sintang yang meliputi 4 (empat) desa, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kapuas Hulu:
 - a) KPH Kapuas Hulu.
 - b) KPH Persiapan LOT XXI.
 - c) KPH BT Kerihau dan Danau Sentarum.
 - d) Desa Rantau Prapat, Nanga Nyabau, Sibau Hulu, Sibau Hilir, Banua Tengah, Sungai Uluk Palin, Tanjung Lasa, Padua Mendalam, Batu Lintang, Bunut Hulu, Nanga Tuan, Tanjung Lokang, dan Bungan Jaya.
- 2) Kabupaten Sintang:
 - a) KPH Sintang/Merakai.
 - b) Desa Radin Jaya, Tanjung Sari, Kayu Dulung, dan Senangan Kecil.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Kegiatan Hibah *Forest Investment Program 1*



Kemajuan persiapan administrasi dari pelaksanaan kegiatan hibah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Register proyek FIP 1 di Kemenkeu sudah dilakukan pada tanggal 3 November 2016.
- 2) Pembukaan Rekening Khusus (BK) berdasarkan NOL dari ADB sudah diusulkan, dan SK Sekjen KLHK untuk pembentukan kelembagaan PMU yang akan mengawal implementasi proyek sudah mulai diproses.
- 3) Sudah dilakukan finalisasi dokumen-dokumen perencanaan yang meliputi: 1) *Overall workplan*, 2) *Annual workplan*, dan 3) PAM.

- 4) *Request for Proposal* untuk 6 (enam) konsultan terpilih sudah selesai pada tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya akan dilakukan penilaian dokumen teknis, dan diharapkan pada akhir Juni atau awal Juli 2017 konsultan sudah terpilih.

Beberapa tantangan atau permasalahan yang potensial dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah adanya restrukturisasi KPH secara nasional berdasarkan UU No. 23/2014, dan khusus untuk Propinsi Kalimantan Barat diperlukan adanya SK Penetapan kembali oleh Menteri karena terjadi perubahan luas dan bentuk. Akibatnya pendanaan kegiatan melalui DIPA belum dapat dilakukan, khususnya untuk kegiatan yang berbasis KPH.

Hibah *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan *Technical Assistance* dari ADB ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+. Kegiatan hibah diharapkan akan berkontribusi terhadap dampak penggunaan sumber daya hutan secara lestari di *Heart of Borneo* (HOB) Indonesia dengan memperkuat kapasitas manajemen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. Dampak tersebut akan diukur dengan indikator: 1) Perluasan atau pemeliharaan tutupan hutan, 2) Kapasitas penyerapan karbon, dan 3) Pengurangan emisi karbon dioksida.

Hasil yang diharapkan dari proyek hibah ini adalah peningkatan pengelolaan sumber daya alam di HOB Indonesia. Perbaikan dalam manajemen akan tercermin dari indikator: 1) Memperkuat kapasitas pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di kelompok kerja HOB nasional, propinsi, dan kabupaten, dan 2) Menyelesaikan rencana hutan lindung di dua kabupaten di dalam unit pengelolaan hutan yang mapan di HOB Indonesia (Kapas Hulu di Propinsi Kalimantan Barat dan Malinau di Propinsi Kalimantan Utara).

Kegiatan hibah dari ADB ini bernilai USD 4,5 juta dengan masa pelaksanaan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017. *Executing agency* dari kegiatan hibah ini adalah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan *implementing agency* adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Adapun lokasi kegiatan hibah meliputi desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu, dan desa Punan Long Adiu Kabupaten Malinau.

Gambar 3.2 Capacity Building Proyek *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo*



Hibah *Enhancing Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hibah UNDP ini bernilai USD 6,26 juta yang mulai efektif dari 1 April 2015 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020. Pelaksana kegiatan hibah adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu 1) Taman Nasional Tangkoko Sulawesi Utara; 2) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Sulawesi Utara; dan 3) Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah, dengan tujuan:

- a) Memperkuat sistem dan kapasitas institusi di bidang perencanaan dan pengelolaan kawasan.

- b) Menjamin keberlanjutan pendanaan bagi sistem kawasan konservasi di Sulawesi.
- c) Menurunkan ancaman dan tata kelola kerjasama di daerah penyanggah dan kawasan konservasi.

Capaian dari pelaksanaan kegiatan hibah ini sampai dengan awal tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) RPTN di ketiga lokasi demonstrasi proyek sudah diperbaharui.
- 2) Degradasi hutan tahunan di ketiga lokasi demonstrasi proyek menurun 5 persen.
- 3) Pedoman *Community Engagement and Co-management* sudah tersusun dan pelatihan terkait sudah dilaksanakan.
- 4) WCU berbasis intelegen telah beroperasi di ketiga lokasi demostrasi proyek.
- 5) Platform untuk *monitoring*, pelaporan dan *sharing* pengetahuan tentang kehati Sulawesi sudah dikembangkan (IT Base Biodiversity Monitoring System).
- 6) Rencana aksi dan rencana konsolidasi sistem kawasan konservasi untuk perluasan dan penyesuaian kembali sistem kawasan konservasi di Sulawesi sudah dikaji.
- 7) Strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kehati dan penyediaan jasa ekosistem sudah dikembangkan.
- 8) Rencana usaha kawasan konservasi sudah dirumuskan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas, sektor swasta, LSM, dan instansi terkait.
- 9) Kebijakan pendorong di bidang lingkungan sudah dirumuskan melalui berbagai pertemuan teknis, konsultasi, dan konsensus di tingkat lokal dan nasional.
- 10) Deliniasi batas partisipatif berbasis kehati di lokasi proyek dan penetapan daerah penyangga dikembangkan.
- 11) Mekanisme *monitoring*, evaluasi dan pelaporan tentang kawasan konservasi dikembangkan dan dikoordinir oleh unit pengendalian.
- 12) Mekanisme *monitoring*, evaluasi dan pelaporan dikembangkan untuk pembaharuan kesehatan ekosistem secara reguler.
- 13) Panduan pelaksanaan pengelolaan species sudah dirumuskan/dikembangkan.
- 14) Resolusi konflik untuk mengurangi perambahan sudah dibangun.
- 15) Program pendidikan untuk komunitas lokal terbaharui melalui unit pendidikan bergerak, dan pusat pendidikan desa sudah dibentuk.

Gambar 3.3 Flora dan Fauna Dilindungi dalam Taman Nasional Lokasi Proyek E-PASS



Hibah Forest Programme, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Forest and Climate Programme (Forclime) merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi REDD+ pada tingkat proyek yang nantinya mendukung kebijakan terhadap kerangka kerja REDD+ di tingkat subnasional maupun nasional. Durasi program ini mulai sejak 19 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2020, dengan tujuan untuk melaksanakan strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari yang menghasilkan penurunan Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan perbaikan taraf hidup. Adapun basis dari program adalah desa atau kampung, khususnya masyarakat desa yang berada di sekitar hutan yang hidup dan penghidupannya bergantung pada hutan. Target program adalah menurunnya emisi karbon sebesar 300.000 sampai dengan 400.000 ton e CO₂ per lokasi *Demonstration Activities (DA)* pada akhir periode di tahun 2020. Dalam pelaksanaannya,

terdapat 3 (tiga) bentuk proponent proyek *Forclime*, yaitu KPH di DA Kabupaten Kapuas Hulu, unit pemegang ijin Usaha Hasil Hutan Kayu di DA Kabupaten Berau, dan kelompok masyarakat adat di Kabupaten Malinau.

Hibah *Forest Programme* merupakan modul *Financial Cooperation (FC)* dari hibah *Forest and Climate Programme (Forclime)*. Hibah ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertujuan memberikan dukungan dan menemukan cara terbaik terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan REDD+ di 3 (tiga) kabupaten di Kalimantan (Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu).

Pelaksanaan hibah ini didasarkan pada *Financing Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia (Kemenkeu sebagai penerima hibah) dan KfW (Republik Federal Jerman sebagai donor) pada tanggal 19 November 2010, dengan nilai hibah sebesar EUR 20 juta ditambah kontribusi Pemerintah Indonesia sebesar EUR 2 juta dalam bentuk *cash* dan *in kind*.

Ruang lingkup kegiatan hibah *Forest Programme* meliputi: i) Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan; ii) Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi; iii) Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan dan *monitoring*; iv) Membantu klasifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan; v) REDD+ dan perhitungan karbon; vi) Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi.

Kegiatan investasi jangka panjang dari kegiatan hibah ini, yaitu: i) Pemetaan Partisipatif Batas Desa (PLUP); ii) Inventarisasi hutan; iii) Patroli hutan berbasis masyarakat; iv) *Argoforesy* dan persemaian; v) Pelatihan masyarakat (sekolah lapang) dan pelatihan mitra program.

Secara umum kegiatan hibah *Forest Programme* sudah berjalan cukup baik, capaian kegiatan selama Triwulan I Tahun 2017, antara lain: 1) Sosialisasi Hutan Desa di Kapuas Hulu; 2) Survei sosek di Berau; 3) Rapat koordinasi percepatan kegiatan investasi di DPMU; 4) Penyelesaian proposal investasi di masing-masing DPMU; dan 5) Partisipasi Hari Hutan Internasional. Adapun permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan proyek adalah implementasi UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah, yang berdampak pada perubahan pengelolaan hibah dari Tugas Pembantuan di kabupaten menjadi terpusat di KLHK.

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Hibah *Forest Programme*



Hibah *Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Hibah dari ADB senilai USD 1,5 juta ini mulai efektif sejak 19 Juni 2013 dan akan berakhir pada 30 Juni 2017, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi: i) Harmonisasi ADB's *Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguards System* di Indonesia; ii) Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia; iii) Penguatan persiapan proyek; dan iv) Pembangunan kapasitas (*capacity building*). Kegiatan hibah ini dilaksanakan bersama oleh beberapa instansi, yaitu: 1) Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral; 2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dari proyek hibah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Output 1 (komponen *safeguard*):
 - a) *Equivalence assessment* dan *workshop* hasil *assessment* terhadap *environment* dan *involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada tahun 2015.
 - b) *Acceptability assessment* terhadap *environment and involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada Juni 2016.
 - c) *Workshop* konsultasi temuan dan *action plan* untuk *equivalence and acceptability assessment* sudah dilakukan pada April dan Juni 2016.
 - d) Laporan *reviu sistem safeguard Indonesia (country safeguard review)* sudah dibuka untuk perhatian umum (*disclosed*) dan *feedback* dari masyarakat sudah diterima sampai dengan 30 Mei 2017. Konsultasi publik sudah dilakukan untuk pejabat pemerintah, swasta, mitra pembangunan dan masyarakat. Laporan CSR akan diinisiasi di awal bulan Juni dan akan dibuka kembali (*disclosed*) untuk perhatian umum.
- 2) Output 2 (komponen *procurement*):

Tiga dari empat keluaran kegiatan hibah ini sudah tercapai, yaitu: 1) *NCB Master bidding document* telah disetujui oleh ADB dan sudah digunakan untuk proyek ADB di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) *Draf standar dokumen pengadaan (Standard Bidding Document)* untuk pengadaan pekerjaan sipil, pengadaan kontrak rancang bangun untuk *international competitive bidding* sudah selesai; dan 3) Sistem pengadaan secara elektronik (SPS) untuk seleksi jasa konsultan internasional sudah diselesaikan dan diaplikasikan pada proyek-proyek ADB di Kementerian PUPR.
- 3) Output 3 (komponen penguatan kesiapan proyek (*project readiness criteria*)):
 - a) *Draf laporan analisis readiness criteria* sudah diperbaiki dan telah dikomentari oleh ADB IRM maupun Bappenas melalui beberapa FGD dan diskusi. FGD terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2017.
 - b) *Workshop* untuk menggali salah satu usulan kegiatan, yaitu mengenai implementasi pengadaan dini untuk proyek infrastruktur dengan pinjaman ADB sudah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017. Saat ini konsultan sedang mengembangkan 2 (dua) volume panduan dan *template-template* petunjuk dan pelaporan.

Hibah Sustainable Infrastructure Assistance Program, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Hibah *Sustainable Infrastructure Assistance Program* merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Australia (DFAT) yang diadministrasikan melalui ADB senilai USD 17,4 juta. Hibah ini dilaksanakan sejak 17 Juni 2013 dan akan berakhir pada 30 Juni 2019. Instansi pelaksana hibah adalah Direktorat Transportasi – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pengelolaan hibah ini dilakukan melalui *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Australia (DFAT), dan ADB.

Lingkup kegiatan dalam hibah ini terdiri dari *Technical Assistance (TA)* dan *Capacity Building* untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan infrastruktur kota lainnya (sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi, dan energi). Total TA yang berjalan adalah 9 (sembilan) TA, termasuk 3 (tiga) TA baru dan 2 (dua) TA yang sudah selesai dilaksanakan. Ketiga TA baru yang efektif di tahun 2016, yaitu:

- 1) TA 9116 INO: *Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway*.
- 2) TA 9113 INO: *Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia's Power Sector*.
- 3) TA 9109 INO: *Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery*.

Adapun TA yang sudah selesai dilaksanakan adalah TA 8506 INO: *Scaling up Hydro Development* dan TA 8508 INO: *IKK Water Supply Project*. TA lainnya yang sudah berjalan adalah:

- 1) TA 8484 INO: *Cluster Management Facility*.
- 2) TA 8518 INO: *Green Cities*.
- 3) TA 8530 INO: *Community Participation RRD*.
- 4) TA 8666 INO: *MSMIP CDTA*.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan hibah ini, ADB sudah melakukan *reviu* dan menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada anggota *steering committee* untuk dimintakan tanggapan.

Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) yang disebut hibah *compact* adalah salah satu pilar utama kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia. Program *compact* ini bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5 tahun, yaitu dari 2 April 2013 sampai dengan 1 April 2018 dengan nilai hibah sebesar USD 600 juta. Instansi pelaksana hibah ini meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta UKPP.

Berbeda dengan pemberi hibah pada umumnya, MCC memberikan keleluasan dan wewenang bagi Indonesia untuk mengembangkan program yang digagas dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pelibatan banyak pemangku kepentingan ini, baik dari Kementerian/Lembaga, akademisi, dunia usaha hingga organisasi masyarakat madani (*Civil Society Organization/CSO*) merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program hibah dari mitra asing. Dengan demikian, program hibah bersaing dari MCC ini sejalan dengan prinsip *Jakarta Commitment*, yaitu Indonesia dan para mitra pembangunan bersama-sama memperkuat kepemilikan (*ownership*) negara penerima bantuan pembangunan.

Dana dalam hibah MCC ini digunakan untuk membiayai 3 (tiga) proyek atau ruang lingkup kegiatan, yaitu:

- 1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*) yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca melalui pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a) Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.
 - b) Bantuan Teknis dan Pengawasan.
 - c) Pengetahuan Hijau.
 - d) Fasilitas hibah kemakmuran hijau.
- 2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mendukung sasaran strategis nasional menurunkan angka *stunting* (pertumbuhan terhambat) menjadi 20 persen pada 2019 dengan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, pendek, dan kekurangan gizi. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a) Pemberdayaan masyarakat.
 - b) Sanitasi.
 - c) Peningkatan peran swasta.
 - d) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan.
 - e) Penyediaan bahan pendukung.
 - f) Kampanye perubahan perilaku hidup sehat.
- 3) Modernisasi Pengadaan bertujuan untuk mendukung peningkatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbaikan kinerja pelaksanaan kontrak. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a) Profesionalisasi pengadaan:
 - Penguatan kelembagaan ULP.
 - Pengelola pengadaan profesional.
 - Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).
 - Percontohan Kontrak Katalog.
 - b) Pengembangan kebijakan yang progresif:
 - Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 - Pengadaan publik berkelanjutan.

Secara umum kegiatan hibah MCC yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sudah berjalan cukup baik, namun secara kumulatif penyerapan hibah ini masih relatif rendah. Berdasarkan capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah:

- 1) Pencatatan nilai realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL.
- 2) Pemberian fasilitas penggantian pajak (PPH dan PPN) seperti yang dipersyaratkan dalam PMK 124/2012.
- 3) Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program MCA-I dalam percepatan proses pengelolaan aset, dan persiapan menuju *Compact End Date* (CED), serta *closing date*.

- 4) Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Program Compact*.

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Hibah *Millenium Challenge Corporation*



Hibah *Minimum Service Standards-Capacity Development Program*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hibah *Minimum Service Standards – Capacity Development Program* merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Daerah sasaran awal hibah ini terdiri dari 110 kabupaten/kota, namun pada akhirnya hanya 108 kabupaten/kota di 16 propinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan hibah. Kegiatan hibah dilaksanakan sejak 2 Juli 2013 dan akan segera berakhir pada tanggal 4 Desember 2017. Hibah MSS-CDP dikelola oleh Sekjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan nilai sebesar EUR 37,3 juta, dan sekitar EUR 22 juta dialokasikan untuk kabupaten/kota dengan mekanisme *on granting*.

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan hibah ini meliputi: i) Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan; ii) Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Pendidikan; iii) Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.

Pada akhir pelaksanaan hibah ini diharapkan dapat tercapai 3 (tiga) output kegiatan yang direncanakan, yaitu:

- 1) Output 1 : meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Adapun capaian sampai dengan awal 2017 adalah sebagai berikut:
 - a) 108 kabupaten/kota telah menyusun proposal peningkatan kapasitas berdasarkan *status quo assessment* tahun 2014.
 - b) 106 kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui sosialisasi, *workshop* dan pelatihan, survei/sensus, dan analisis data.
 - c) 40 kabupaten telah menyelesaikan *roadmap* pemenuhan SPM Dikdas, dan 68 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses finalisasi.
 - d) Lebih dari 90 persen satuan pendidikan di 106 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan penyusunan RKS/RKAS dalam rangka pemenuhan SPM.
- 2) Output 2 : meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Adapun capaian sampai dengan awal 2017 adalah sebagai berikut:
 - a) Modul sosialisasi dan pelatihan SPM sudah tersusun.
 - b) Lebih dari 90 persen kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi SPM kepada *stakeholder* seperti DPRD, Dewan Pendidikan, SKPD terkait, dunia usaha/industri, dan Komite Sekolah/Madrasah.
 - c) Kampanye SPM telah dilakukan melalui brosur, penulisan artikel di media, iklan TV, radio *talk show*, dan *web series* MURID 5.
- 3) Output 3 : meningkatnya pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. Adapun capaian sampai dengan awal 2017 adalah sebagai berikut:
 - a) 10 kabupaten/kota telah mengintegrasikan *roadmap* kedalam Renstra dan PRJMD.
 - b) 6 kabupaten/kota telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang SPM.

- c) Sebagian besar satuan pendidikan telah mengintegrasikan program pemenuhan SPM kedalam RKS/M dan RKAS/M.
- d) Tim Pusat sedang dalam proses pembahasan revisi SPM untuk menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2014 dan melakukan sinkronisasi SPM dengan akreditasi.

Hibah Sustainable Palm Oil Initiative, Kementerian Pertanian

Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan perkiraan pertumbuhan produksi tahunannya sekitar 10 persen. Mengingat potensi sawit yang sangat besar, Pemerintah Indonesia berupaya melipatgandakan produksi minyak sawit menjadi 40 juta ton pada tahun 2020. Untuk meningkatkan produksi tersebut, maka dibutuhkan sedikitnya 5 sampai 20 juta hektar lahan untuk kebun sawit baru. Ekspansi pembukaan lahan baru tersebut mengancam hutan tropis dan lahan gambut yang tersisa. Namun, terdapat pula peluang untuk meningkatkan produktifitas melalui peningkatan keuntungan dan penggunaan lahan terdegradasi.

Kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan potensi ekonomi, serta menjaga kelestarian ekosistem dan masyarakat adalah hal yang sangat mendasar untuk mengamankan masa depan hutan Indonesia maupun meningkatkan mata pencaharian melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk keperluan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk skema sertifikasi nasional yang disebut ISPO (*The Indonesian Sustainable Palm Oil*), yang menuntut produsen untuk mematuhi semua regulasi terkait produksi minyak sawit, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap pekerja dan komunitas sosial.

UNDP mendukung operasionalisasi dan optimalisasi ISPO karena meliputi semua produsen di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem hukum Indonesia. Selain ISPO, RSPO (*Roudtable for Sustainable Palm Oil*) juga penting untuk diperhatikan karena memberikan standar praktik terbaik. Sehingga kolaborasi kedua skema tersebut sangat penting untuk masa depan sektor minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Inisiatif Minyak Sawit Berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil Initiative* (SPOI) adalah kemitraan swasta utama yang mendukung produksi sawit berkelanjutan sambil meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. SPOI bertujuan untuk mempromosikan minyak sawit lestari dengan mengurangi deforestasi dan memberikan dukungan kepada perubahan struktural di sektor ini melalui fokus pada beberapa area strategis sebagai berikut:

- Memastikan pemangku kepentingan minyak sawit di Indonesia terkoordinasi dengan baik melalui *platform* minyak sawit nasional, yaitu dengan:
 - Memfasilitasi koordinasi pemangku kepentingan minyak sawit melalui keterlibatan pemerintah untuk mendorong pelembagaan dan keberlanjutan, keterlibatan sektor swasta, LSM, masyarakat lokal, dan organisasi petani kecil.
 - Menyediakan akses terhadap pembuatan kebijakan pemerintah (rekomendasi kepada ISPO dan peraturan mendasar lainnya).
- Memperkuat petani kecil untuk memperbaiki mata pencaharian dan praktik pertanian yang berkelanjutan dengan cara:
 - Memberikan pelatihan kepada petani kecil tentang produktifitas, lingkungan, harga yang lebih adil, manajemen dan sertifikasi ISPO.
 - Memperkuat sistem penyuluh pertanian pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan solusi yang berhasil.
 - Bekerja dengan koperasi petani kecil dan perkebunan yang lebih besar untuk mengurangi ekspansi ke hutan.
- Mengurangi deforestasi dengan cara:
 - Mempercepat pertukaran lahan dan penggunaan lahan terdegradasi untuk produksi sawit melalui pengembangan hukum/kebijakan yang menyebabkan berkurangnya penggunaan lahan hutan yang subur.
 - Pengarusutamaan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS) ke dalam perencanaan tata ruang.
 - Memperkuat kasus untuk melindungi HCV/HCS secara legal di dalam konsesi.
 - Mengukur/mengelola emisi Gas Rumah Kaca.

- Memperbaiki mekanisme kepemilikan lahan dan mediasi, yaitu dengan:
 - Memberikan dukungan kepada petani sawit mandiri untuk mendapatkan status tanah legal, yang merupakan kunci sertifikasi di bawah RSPO dan ISPO.
 - Memperkuat sistem mediasi konflik lokal, yang mengarah ke penggunaan lahan secara lebih efektif di wilayah tersebut.
- Mengoperasikan skema sertifikasi nasional untuk mendorong sektor minyak sawit lestari dengan cara:
 - Mendukung ISPO untuk mengoperasionalkan dan mengoptimalkan pedoman, sehingga ISPO dapat secara efektif menangani masalah sosial ekonomi dan lingkungan.
 - Mendukung pengembangan sistem audit pihak ketiga bagi ISPO untuk memastikan kredibilitas internasional.

Kemajuan kegiatan Inisiatif Minyak Sawit Berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil Initiative/SPOI*, antara lain:

- *Buy-in* dan kepemilikan Pemerintah Indonesia untuk mendukung minyak sawit lestari.
- Koordinasi antar kementerian diperkuat.
- Reformasi kebijakan diidentifikasi untuk mengatasi akar penyebab deforestasi dari sawit.
- Pengembangan *platform* sawit nasional sejak tahun 2011, disosialisasikan oleh Menteri Pertanian di tahun 2012, dan dioperasionalkan pada tahun 2013.
- Studi bersama yang membandingkan RSPO dan ISPO sudah tersedia, berfokus pada HCV (*High Conservation Value*) dan FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*)

Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Petani Sawit Indonesia



Hibah Support to The Justice Sector Reform in Indonesia (Sustain), Mahkamah Agung

Reformasi besar di sektor peradilan di Indonesia terjadi mulai tahun 2004, ketika tanggung jawab administratif pada level yudikatif yang lebih rendah, yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Kehakiman, Kementerian Agama dan Angkatan Bersenjata dipindahkan ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kebijakan, Mahkamah Agung menetapkan dua cetak biru; pertama di tahun 2003 dan yang terakhir pada tahun 2010 yang menetapkan Reformasi Peradilan Indonesia 2010-2035 sebagai pembaruan dari cetak biru sebelumnya, yang akan dilaksanakan melalui rencana kerja lima tahun.

Namun, peradilan Indonesia terus membutuhkan dukungan untuk melaksanakan agenda reformasinya. Ada sejumlah isu penting yang harus ditangani untuk kemajuan reformasi di bidang peradilan, yaitu 1) Integritas; 2) Mutu penyampaian layanan keadilan terutama terkait kapasitas kelembagaan; dan 3) Akses terhadap keadilan. Adapun alasan mengenai perlunya reformasi peradilan adalah (1) Pengadilan berada di puncak sistem penegakan hukum dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan tertinggi untuk mewujudkan keadilan; (2) Mandatnya sangat luas dan mencakup hampir semua aspek kehidupan publik, yaitu dari masalah pidana sampai masalah administratif dan perdata. Oleh karena itu, peradilan yang patut dicontoh tidak hanya penting untuk menanamkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum, tapi juga seluruh aparat negara.

Dukungan untuk Proyek Reformasi Sektor Peradilan di Indonesia (SUSTAIN) adalah selama lima tahun yang dimulai dari 21 Juli 2014 sampai 20 Juli 2019 senilai USD 13 juta, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperkuat peraturan perundangan. Tujuan spesifiknya adalah untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas peradilan, serta kualitas pelayanan

peradilan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun hasil yang diharapkan dapat dicapai melalui proyek ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pengawasan internal dan eksternal dari lembaga peradilan ditingkatkan.
- 2) Pengetahuan dan keterampilan hakim dan staf pengadilan ditingkatkan, serta kapasitas Pusat Pelatihan Mahkamah Agung diperkuat.
- 3) Manajemen sumber daya manusia dan organisasi melalui database manajemen kinerja yang terintegrasi ditingkatkan, kebijakan sumber daya manusia yang canggih diterapkan secara efektif, dan Kantor Tim Pembaruan Yudisial diperkuat;
- 4) Sistem manajemen kasus dan prosedur peradilan untuk memperbaiki transparansi, kualitas data kasus dan keputusan, serta ketepatan waktu penanganan kasus ditingkatkan.

Proyek hibah UNDP ini akan dilaksanakan di wilayah peradilan seluruh Indonesia dan 15 wilayah peradilan percontohan di Kabanjahe, Stabat, Malang, Kepanjen, Maumere, Ambon, Cibinong, Jayapura, Manado, Bitung, Sorong, Pontianak, Singkawang, Kupang, dan Bandung.

Ruang lingkup kegiatan hibah meliputi pengawasan internal dan eksternal peradilan, pelatihan yudisial, manajemen SDM, dan manajemen perkara, dengan komponen kegiatan, yaitu:

- 1) Komponen 1: Peningkatan fungsi mekanisme pengawasan internal dan eksternal lembaga peradilan.
- 2) Komponen 2: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan hakim, dan pegawai pengadilan meningkat.
- 3) Komponen 3: Pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi peradilan meningkat melalui manajemen database kinerja SDM terpadu, pelayanan kebijakan SDM yang efektif dan prima, dan penguatan tim pembaruan peradilan diperkuat Kantor Tim Pembaruan Peradilan.
- 4) Komponen 4: Perbaikan sistem manajemen perkara serta prosedur peradilan demi meningkatkan transparansi, kualitas data perkara, keputusan dan ketepatan waktu penanganan perkara.

Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Hibah Support to The Justice Sector Reform in Indonesia



Selain kesepuluh hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja dari masing-masing proyek. Hibah luar negeri lainnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2017 berjumlah 40 proyek, yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 306,2 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
HIBAH TERENCANA					
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional					
1	27KR7AMA	UNFPA	CP-9 UNFPA	29/03/2016 s/d Desember 2016	0,2
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	623031 INJ 149	Australia	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase 2	01/07/2012 s/d 31/07/2017	70,7
2	TF 0A2519	Bank Dunia	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK (CSRRP)	20/05/2016 s/d 31/12/2017	1,6
3	TF 094792	Bank Dunia	Support for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project - Pamsimas	11/09/2009 s/d 30/09/2017	62,7
4	66387 INJ 149	SAIGG	Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIG)	01/07/2012 s/d 31/07/2017	30,6
5	2VPZQG7A	KFW	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	07/11/2016	0,8
6	2H1GNLLA	KFW	Feasibility Study for the Project Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	07/11/2016	2,7
7	73657101	SECO	Emission Reduction in Cities Solid Waste Management	02/05/2013 s/d 30/06/2018	8,1
HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA					
Badan Nasional Penanggulangan Bencana					
1	73608801	United Nation Development Programme	Safer Communities through Disaster Risk Reduction Phase II (SCDRR Phase II)	01/04/2013 s/d 31/12/2016	1,9
2	72544001	The Indonesian Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery	Mentawai Islands Livelihoods Recovery Programme	Februari 2012 s/d Desember 2014	1,7
3	72621901	The Indonesian Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery	Merapi Volcanic Eruption Livelihoods Recover Programme	Februari 2012 s/d Desember 2014	1,5
4	25AWBGKA	Japan International Cooperation Agency	The safe School Reconstruction on Devastated Area	01/11/2016 s/d 01/11/2016	4,7
5	72829501	USAID	Pendampingan Tenaga Ahli untuk In Aware Phase I	November 2016	0,8
6	73921901	USAID	In Aware Phase I	November 2016	0,2
9	71671901	JICA	Penanganan Darurat untuk Bencana Gempa Bumi Aceh	Januari 2017	0,3

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional					
1	71873301	DFAT	<i>Indonesia Infrastructure Initiative Phase II</i>	23/09/2011 s/d 30/06/2017	27,7
2	74900201	DFAT	<i>Australia – Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Agriculture (AIP PRISMA)</i>	28/10/2013 s/d Juni 2017	58,9
Kementerian Keuangan					
1	N/A	EU melalui Bank Dunia	PFM-MDTF II	21/03/2016 s/d 31/12/2018	2,7
2	N/A	EU melalui Bank Dunia	PFM MDTF Support to Indonesia Public Financial Management Project	12/07/2016	0,6
3	N/A	EU melalui Bank Dunia	PFM MDTF Support to Indonesia Public Financial Management Project	17/06/2017	0,1
4	N/A	Kanada melalui Bank Dunia	InIFD	25/04/2016 s/d 31/12/2020	2,5
5	TA9054-INO	ADB	<i>Enhancing the Regulatory Framework of Financial Sector Development and Oversight</i>	17/02/2016 s/d 17/02/2018	0,8
6	23H15VSG	GIZ	<i>GIZ Transportasi</i>	01/03/2016 s/d 31/03/2017	0,3
7	75132	UNDP	<i>Sustainable Development Project</i>	26/09/2014 s/d Agustus 2017	0,6
8	226EDYDDA	UNDP	<i>Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)</i>	N/A	1,0
9	71484001	AIPEG	AIPEG	N/A	1,8
10	71484001	AIPEG	GPF Phase 2	N/A	0,6
11	905001	JICA	<i>Project on Modernization of Tax Administration Phase 2</i>	14/07/2014 s/d 30/06/2018	0,8
12	N/A	Trust Fund (Bank Dunia)	<i>Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)</i>	N/A	1,8
13	N/A	GIZ	<i>Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Program</i>	15/06/2016	0,3
14	N/A	Australia	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kegiatan (KOMPAK)	23/12/2016	0,4
HIBAH LANGSUNG UANG					
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI					
1	TF-OA2261	Bank Dunia	<i>Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Phase 3</i>	04/05/2016 s/d 04/05/2016	0,4
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional					
1	25LYR55M	USAID	<i>USAID Support for Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i>	19/06/2015 s/d 30/09/2018	5,0
2	2XFJZUTA	<i>United Nations Childrens Fund</i>	<i>Country Programme Action Plan (CPAP) 2016-2020</i>	01/01/2016 s/d 31/12/2020	3,3
3	2JCK3X5Q	Danida	<i>Dukungan Environmental Support Programme Phase III (ESP3) kepada Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i>	08/01/2016 s/d 31/12/2017	0,2
4	2MFFVJHA	<i>The United Kingdom of Great Britain</i>	<i>Forest and Peatland Management to Reduce Emission in Indonesia Through Local Actions</i>	05/04/2016 s/d 31/03/2018	3,7

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
		<i>and North IR</i>			
5	N/A	UNFPA	<i>Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9 (2016-2020)</i>	26/03/2016 s/d 31/12/2020	0,8
6	74846401	IFAD	SEDSSTC	10/02/2014 s/d 31/12/2016	0,5
Kementerian Keuangan					
1	TF 0A2268	IBRD	<i>Indonesia Infrastructure Initiative - Phase II</i>	25/04/2016 s/d 31/12/2020	2,5
2	TA 8858-INO	ADB	<i>Strengthening Knowledge Sharing In Indonesia - Financial Inclusion Economist</i>	08/01/2015 s/d 31/12/2017	0,4
TOTAL					306,2

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2017 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Badan Informasi Geospasial						56,9	55,8	1,1	0,0	0,0	0,0
1	IP-544	JICA	National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project	29/03/2007	26/07/2017	56,9	55,8	1,1	0,0	0,0	0,0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan						57,8	38,9	18,9	44,8	0,0	0,0
<u>Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan</u>											
2	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19/02/2013	30/06/2018	57,8	38,9	18,9	44,8	0,0	0,0
Badan Pengusahaan Batam						47,7	2,5	45,2	21,5	0,0	0,0
3	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	29/12/2014	29/06/2019	47,7	2,5	45,2	21,5	0,0	0,0
Badan Pusat Statistik						47,0	3,7	43,3	13,4	0,0	0,0
4	8038-ID	Bank Dunia	Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)	18/07/2011	30/11/2018	47,0	3,7	43,3	13,4	0,0	0,0
Kementerian Agama						128,4	4,1	124,3	13,7	3,9	28,7
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam</u>											
5	IND-0164	IDB	The Support to Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18/05/2013	10/11/2018	123,8	0,6	123,1	14,8	0,5	3,5
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						518,1	345,5	172,7	6,4	0,1	1,1
<u>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>											
6	8217-ID	Bank Dunia	Village Innovation Project	22/03/2013	31/12/2018	450,0	289,1	160,9	0,0	0,1	0,0
7	755-ID	IFAD	Village Development Programme	17/03/2009	31/03/2018	68,1	56,4	11,7	6,4	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Kementerian Kelautan dan Perikanan						156,9	87,9	69,0	16,5	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</u>											
8	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05/06/2014	30/06/2019	47,4	21,5	25,9	0,0	0,0	0,0
	3094-INO	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	24/02/2014	30/06/2019	45,5	11,2	34,4	13,3	0,0	0,0
9	880-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	23/10/2012	30/06/2018	34,0	26,9	7,1	1,5	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</u>											
10	CID 1025 01 C	Perancis (AFD)	Infrastructure Development Space Oceanography (INDES0)	18/06/2012	30/06/2017	30,0	28,4	1,6	1,7	0,0	0,0
Kementerian Ketenagakerjaan						32,5	3,2	29,3	24,1	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktifitas</u>											
11	IND-0159,0160	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23/12/2013	23/12/2017	32,5	3,2	29,3	24,1	0,0	0,0
Kementerian Komunikasi dan Informatika						51,3	49,4	1,9	3,9	2,3	60,1
<u>Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika</u>											
12	21686401	Perancis	Improvement on TV Transmitting Stations (ITTS) - Phase II	31/12/2014	15/12/2018	51,3	49,4	1,9	3,9	2,3	60,1
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						4.621,8	1.970,0	2.651,8	486,4	49,3	10,1
<u>Sekretariat Jenderal</u>											
13	3455-INO	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	21/12/2016	31/12/2019	148,2	0,0	148,2	0,9	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Bina Marga</u>											
14	IP-545	JICA	Aceh Reconstruction Project	29/03/2007	26/07/2017	103,4	76,3	27,1	0,0	0,0	0,0
15	INA-17	Korea	Padang By-Pass Capacity Expansion Project	14/04/2011	14/08/2017	59,9	28,9	31,0	1,9	1,0	52,1
16	2817-INO	ADB	Regional Road Development Project (RRDP)	31/07/2012	31/07/2018	180,0	82,4	97,6	18,8	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29/04/2013	10/06/2019	65,0	15,7	49,3	4,6	2,2	47,9
17	IP-529	JICA	Tanjung Priok Access Road Construction Project I	28/07/2005	30/12/2017	234,7	141,1	93,6	7,5	0,0	0,0
18	201542 TTL 38	RR Tiongkok	Toll Road Development of Balikpapan Samarinda	30/09/2016	30/09/2021	53,4	2,0	51,4	7,8	0,0	0,0
19	21662601	RR Tiongkok	Toll Road Development of CISUMDAWU Phase I	12/11/2012	28/08/2017	93,0	74,7	18,3	7,5	0,0	0,0
20	20161 TTL 389	RR Tiongkok	Toll Road Development of CISUMDAWU Phase II	30/09/2016	30/09/2022	219,4	3,9	215,5	10,9	0,0	0,0
21	20167 TTL 395	RR Tiongkok	Toll Road Development of Manado-Bitung	30/09/2016	30/09/2022	78,1	5,4	72,7	9,9	1,3	13,4
22	21663301	RR Tiongkok	Toll Road Development of Medan - Kualanamu	11/03/2013	11/03/2018	122,4	52,0	70,5	21,1	2,5	12,0
23	201539 TTL 38	RR Tiongkok	Toll Road Development of Solo Kertosono I	30/09/2016	30/09/2021	198,8	11,7	187,1	26,9	0,0	0,0
24	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12/03/2012	31/12/2017	250,0	105,5	144,5	34,2	4,5	13,1
<u>Direktorat Jenderal Cipta Karya</u>											
25	8259-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	02/08/2013	31/12/2017	99,9	81,1	18,8	0,0	0,0	0,0
26	8578-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS III)	22/08/2016	31/12/2020	300,0	8,1	291,9	33,9	0,0	0,0
27	2010 66 471	Jerman (Kfw)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02/05/2013	30/06/2018	80,1	2,2	77,9	11,9	0,0	0,0
28	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22/11/2010	31/12/2019	35,0	22,1	12,9	2,1	0,0	0,0
29	IP-565	JICA	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23/06/2014	23/06/2021	17,6	0,0	17,6	11,9	0,0	0,0
30	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	80,0	0,0	80,0	10,8	0,0	0,0
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
31	8213-ID	Bank Dunia	National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015	01/03/2013	30/09/2017	266,0	249,2	16,8	18,3	2,0	10,7
	IND-0174	IDB	National Slum Upgrading Project	18/09/2016		8,0	0,0	8,0	0,2	0,0	0,0
32	IND-0175	IDB	National Slum Upgrading Project	18/09/2016		311,8	0,0	311,8	32,1	0,0	0,0
	IND-0176	IDB	National Slum Upgrading Project	18/09/2016		10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
33	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17/07/2014	30/06/2018	74,4	33,9	40,5	16,7	0,0	0,0
	IND-0169	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	187,0	170,5	16,5	13,0	0,0	0,0
34	IND-0170	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	8,0	6,1	1,9	1,3	0,0	0,0
	IND-0171	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	10,0	8,3	1,7	1,3	0,0	0,0
35	IP-564	JICA	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	23/06/2014	23/06/2019	89,5	85,2	4,2	0,1	0,1	98,5
36	IND-0167	IDB	SANIMAS Comunity-Based Satnitation Project In Indonesia	29/10/2014	29/10/2019	100,0	38,3	61,7	21,4	22,5	105,0
<u>Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</u>											
37	21595701-31	RR Tiongkok	Additional Loan for Jatigede Dam	03/09/2013	09/01/2017	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14/02/2012	22/03/2019	99,4	28,6	70,9	27,3	2,6	9,5
39	IP-552	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I	28/07/2009	28/07/2018	54,1	37,2	16,8	11,8	0,0	0,0
40	IP-567	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23/06/2014	23/06/2021	44,2	2,6	41,6	9,0	0,0	0,0
41	7669-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	08/06/2009	30/06/2017	50,0	45,3	4,7	3,0	0,0	0,0
42	3440-INO	ADB	Flood Management in Selected River Basin	09/12/2016	31/12/2022	108,7	0,0	108,7	16,3	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
43	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	18/08/2012	28/02/2019	139,6	73,2	66,4	11,0	0,0	0,0
44	IP-522	JICA	Lower Solo River Improvement Project II	28/07/2005	30/09/2017	83,4	73,7	9,7	2,3	1,9	82,6
45	IP-546	JICA	Participatory Irrigation System Improvement Project	25/07/2008	25/10/2017	109,8	107,5	2,3	2,3	0,5	22,1
46	IP-559	JICA	Upper Citarum Basin Flood Management	28/03/2013	25/07/2020	29,5	4,3	25,2	11,2	1,6	14,2
47	IP-551	JICA	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/07/2017	66,8	49,5	17,3	5,3	0,0	0,0
48	IP-566	JICA	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	23/06/2014	23/06/2021	45,6	22,9	22,7	15,5	6,7	43,3
49	8027-ID	Bank Dunia	Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II)	14/11/2011	31/12/2018	150,0	103,7	46,3	44,5	0,0	0,0
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						20,3	20,0	0,3	1,4	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</u>											
50	2007 66 071	Jerman (KfW)	Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training	15/12/2011	30/06/2017	20,3	20,0	0,3	1,4	0,0	0,0
Kementerian Perhubungan						753,5	130,2	623,2	58,0	0,1	0,1
<u>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</u>											
51	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01/05/2010	05/04/2018	87,6	10,9	76,7	20,9	0,1	0,3
<u>Direktorat Jenderal Perkeretaapian</u>											
52	21671901	Perancis (NATIXIS)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	30/06/2018	85,4	0,0	85,4	6,2	0,0	0,0
	CID 1029 01G	AFD	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	31/03/2018	51,7	0,0	51,7	3,7	0,0	0,0
53	IP-563	JICA	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	23/06/2014	20/06/2021	145,6	0,0	145,6	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
54	168	RR Tiongkok	Procurement of Track Material and Turnout Phase I	24/01/2017	18/08/2019	175,1	0,0	175,1	27,3	0,0	0,0
55	IP-508	JICA	Railway Electrification and D.D.Tracking Project I	13/12/2001	11/09/2017	208,1	119,3	88,8	0,0	0,0	0,0
Kementerian Pertanian						129,1	85,3	43,8	32,5	1,0	3,0
<u>Badan Ketahanan Pangan</u>											
56	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	06/07/2011	31/07/2019	49,1	40,1	9,0	16,7	0,2	1,2
<u>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</u>											
57	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25/10/2012	30/06/2019	80,0	45,2	34,8	15,8	0,8	4,9
Kementerian PPN/Bappenas						175,8	116,1	59,7	21,9	5,3	24,4
<u>Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana</u>											
58	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	23/06/2014	23/06/2023	63,1	20,5	42,7	10,8	3,1	29,1
<u>Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas</u>											
59	8010-ID	Bank Dunia	Scholarships Program for Strengthening Reforming Institution (SPIRIT)	16/06/2011	31/12/2017	112,7	95,7	17,0	11,1	2,2	19,7
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						947,2	335,8	611,4	132,9	17,2	12,9
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</u>											
60	IP-553	JICA	Development of Bandung Institute of Technology III	28/07/2009	28/07/2018	50,5	28,2	22,3	1,8	0,0	0,0
61	IP-549	JICA	Development of World Class University at University of Indonesia	25/07/2008	15/07/2018	130,6	78,2	52,4	7,7	4,2	54,8
62	IP-541	JICA	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26/07/2007	26/07/2019	69,6	56,6	13,0	2,9	0,0	0,0
63	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07/02/2013	30/06/2018	75,0	33,0	42,0	9,6	0,0	0,1

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
64	IND-0177	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06/11/2016		13,9	0,0	13,9	1,4	0,0	0,0
	IND-0178	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06/11/2016		162,6	0,0	162,6	0,2	0,0	0,0
65	IND-0137	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	30/06/2017	31,3	19,7	11,6	0,0	6,1	0,0
	IND-0138	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	30/06/2017	32,7	28,7	4,0	3,0	1,9	62,1
	SFD/8/526	Saudi Fund	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	28/11/2010	31/08/2017	36,0	22,7	13,3	2,5	0,0	0,0
66	IND-0140	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24/07/2011	30/09/2017	26,8	21,5	5,3	2,9	0,0	0,0
67	IND-0155	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	30/06/2017	24,6	15,9	8,7	6,3	1,7	27,3
	IND-0156	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	30/06/2017	4,6	0,1	4,5	4,6	0,1	1,3
68	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14/04/2014	28/10/2018	174,0	1,4	172,6	72,3	0,4	0,6
	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15/09/2014	31/12/2018	35,0	0,0	35,0	11,0		
<u>Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</u>											
69	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12/06/2013	31/12/2020	80,0	29,6	50,4	6,7	2,8	41,7
Kepolisian Republik Indonesia						71,6	8,2	63,4	23,6	0,0	0,0
70	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	15/07/2014	21/01/2018	33,4	7,8	25,6	11,0	0,0	0,0
71	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14/02/2012	22/11/2018	38,2	0,4	37,7	12,6	0,0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						15,7	12,0	3,7	4,1	0,0	0,0
72	LA 15.04.2011	Spanyol	Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production	20/10/2011	30/06/2017	15,7	12,0	3,7	4,1	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)						4,6	2,7	1,9	0,9	0,0	0,0
73	8192-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	12/06/2013	31/03/2018	4,6	2,7	1,9	0,9	0,0	0,0
PT. PERTAMINA						415,6	159,6	255,9	85,5	2,3	2,7
74	8082-ID	Bank Dunia	Geothermal Clean Energy Investment Project	29/06/2012	31/12/2018	175,0	120,2	54,8	32,9	1,9	5,6
75	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25/10/2011	25/10/2019	240,6	39,5	201,1	52,6	0,4	0,8
PT. PLN						3.407,4	717,6	2.689,9	298,4	85,2	28,6
76	IP-532	JICA	Asahan Hydroelectric Power Plant III	26/06/2008	26/06/2017	246,6	9,7	236,9	2,4	0,1	6,1
77	IP-555	JICA	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31/03/2010	31/03/2019	34,7	13,6	21,1	4,4	0,6	13,0
78	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (PTD I)	30/05/2011	30/06/2018	205,0	109,8	95,2	0,0	2,7	0,0
79	IP-561	JICA	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	23/10/2013	23/10/2022	15,4	2,0	13,4	3,9	0,9	23,6
80	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	224,0	8,4	215,6	35,9	6,5	18,0
	8276-INO	AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	25,0	0,9	24,1	4,0	0,7	18,0
81	IP-556	JICA	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26/03/2013	30/04/2022	330,1	15,2	314,8	19,1	0,0	0,0
82	IP-539	JICA	North-West Sumatera Inter-Connector Transmission	26/01/2009	26/01/2017	143,8	89,6	54,2	27,7	2,4	8,5
83	EXIM PBC 330	RR Tiongkok	Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant	03/06/2015	03/06/2020	373,0	53,1	319,9	59,9	33,5	55,8
84	21661901	RR Tiongkok	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project	02/05/2013	02/05/2018	132,2	76,2	56,0	61,8	9,5	15,3
85	IP-538	JICA	Peusangan Hydroelectric PP Construction Project	26/01/2009	26/01/2019	232,1	121,8	110,3	24,5	2,9	11,8
86	IP-537	JICA	PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities	29/01/2009	29/01/2018	40,1	2,5	37,6	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
	26180	Kfw	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 3)	05/12/2014	30/09/2017	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
87	CID 1039 01H	AFD	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 7)	25/07/2014	30/06/2018	20,0	1,1	18,9	14,9	1,1	7,2
	28221000	JBIC	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 8)	19/11/2012	30/06/2017	17,1	0,7	16,4	1,7	0,7	40,5
88	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26/03/2014	31/12/2018	325,0	27,7	297,3	0,0	6,9	0,0
89	CID 1024 01B	AFD	Strengthening West Kalimantan Power Grid	08/02/2013	30/06/2018	49,5	38,9	10,6	0,9	0,0	0,0
	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04/04/2014	30/06/2018	49,5	28,6	20,9	0,9	0,0	3,5
90	EXIM PBC 329	RR Tiongkok	Takalar Coal Fired Steam Power Plant	29/04/2015	29/04/2020	241,0	84,1	156,9	35,2	16,1	45,8
91	IP-560	JICA	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	23/10/2013	23/10/2022	45,5	1,3	44,2	1,3	0,0	0,0
92	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01/05/2012	31/12/2018	640,0	32,3	607,7	0,0	0,7	0,0
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)						100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
93	7731-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIF)	25/04/2011	31/03/2017	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta						1.100,7	398,3	702,4	342,7	15,9	4,7
94	IP-554	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28/07/2009	28/07/2019	429,6	364,1	65,4	52,4	0,1	0,3
95	IP-571	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II	31/03/2016	31/03/2022	671,1	34,1	637,0	290,2	15,8	5,4
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)						3.559,2	2.641,5	917,7	966,0	140,9	14,6
Total						16.414,3	7.284,5	9.129,7	2.599,7	320,2	12,3